
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA DUWET KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO

Muh Hamdi Zain¹, Mita Wardani²

¹Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

²Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

Email: hamdizainm@gmail.com

ABSTRAK

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Bantuan yang diberikan berupa kegiatan memperbaiki komponen rumah atau memperluas rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak huni.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Metode penelian ini menggunakan metode kualitatif adalah metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alami.

Dari segi kebijakan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) perangkat desa memberikan usulan kepada pemerintah siapa saja yang layak untuk mendapatkan bantuan BSPS tersebut, setelah itu pemerintah menyetujui apa yang di usulkan oleh perangkat desa. Dari segi pelaksana, dari Pendamping hingga Koordinator sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga program BSPS ini berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari segi target, dalam hal ini pencapaian target sudah sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal mereka, dari rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni sehingga masyarakat dapat tinggal dengan nyaman dan tentram tanpa ada gangguan misalnya seperti hujan. Dari segi lingkungan, dalam lingkungan harus menciptakan suasana yang rukun dan damai agar tercipta lingkungan yang bersosialisasi tinggi dan tidak lagi ada kecanggungan antara suatu organisasi dengan masyarakat. Dari segi proses, masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dapat merasakan hasil dari adanya program ini serta pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

ABSTRACT

Self-help Housing Stimulant Assistance (BSPS) is government facilitation in the form of stimulant assistance for the construction/improvement of the quality of houses for Low-Income Communities (MBR). Recipients of Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS), namely Low-Income Communities (MBR) who occupy uninhabitable houses (RTLH). Low-Income Communities (MBR) are people who have limited purchasing power, so they need government support to obtain decent housing. The assistance provided is in the form of activities to repair house components or expand houses to improve or meet the requirements for livable housing.

This research was conducted to find out how the Implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Duwet Village, Panarukan District, Situbondo Regency.

This research method using qualitative methods is a naturalistic research method because the research was carried out in natural conditions.

In terms of policy, the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program in Duwet Village, Panarukan District, Situbondo Regency is in accordance with the policies issued by the central government, namely the Ministry of PUPR (Public Works and Public Housing) village apparatus providing suggestions to the government who is eligible to receive assistance BSPS, after that the government agreed to what was proposed by the village apparatus. In terms of implementation, from the Assistant to the Coordinator, they have carried out their duties properly so that the BSPS program runs according to the applicable procedures. In terms of targets, in this case the achievement of targets is in accordance with the environmental conditions of the underprivileged community to meet their housing needs, from uninhabitable houses to habitable houses so that people can live comfortably and peacefully without any disturbances such as rain. In terms of the environment, the environment must create a harmonious and peaceful atmosphere in order to create an environment that is highly sociable and there is no longer any awkwardness between an organization and the community. In terms of process, the community and parties involved in the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) can experience the results of this program and its implementation according to procedures.

Keywords: Policy Implementation, Self Help Housing Stimulant Program

PENDAHULUAN

Di Indonesia permasalahan kemiskinan tidak pernah habis untuk dibahas, terutama pada permasalahan akan perumahan karena pada dasarnya rumah sebagai kebutuhan papan. Ketidakberdayaan mereka memiliki kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Demi mengatasi permasalahan kemiskinan, maka pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk menciptakan sebuah program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi

dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masadepan perekonomian dunia. Menurut Kunarjo (dalam Badrul Munir 2002:10), suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (lebih dari 2 persen per tahun). Di negara berkembang salah satunya Negara Indonesia yang masih menghadapi masalah ekonomi berkepanjangan, pengangguran dan pendapatan masyarakat yang masih rendah, sehingga mereka mencari tempat tinggal atau membangun dengan kemampuan seadanya sehingga tumbuh dan berkembang Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berkembang pada daerah- daerah yang pengawasannya kurang baik atau tidak terjaga.

Pemerintah sebagai pembina, pengawas dan pengendali pembangunan perumahan selayaknya memahami fenomena ini sejak awal sehingga sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Aparat pemerintah yang berkaitan dengan perumahan masih banyak yang belum mengetahui akar masalah terjadinya perumahan tidak layak huni sehingga penyelesaiannya pun masih bersifat adhoc. Oleh sebab itu aparat pemerintah bidang perumahan harus diberi pengetahuan dan keterampilan dalam menangani masalah perumahan tidak layak huni. Salah satu program pemerintah untuk mengatasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan alat analisis Data Envelopment Analysis (DEA).

Penelitian dilakukan untuk melihat apakah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat mengurangi kemiskinan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hasil penelitian menunjukkan dari delapan provinsi yang diteliti, enam provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua dan Sulawesi Selatan) pelaksanaan program tersebut efisien (100%), untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat pelaksanaan program tidak efisien (86,6%) serta untuk Provinsi Aceh pelaksanaan program mendekati efisien (91,4%). Hasil penelitian menunjukkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat mengurangi kemiskinan dengan adanya peningkatan kualitas rumah, tetapi belum mampu mengurangi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Sedangkan Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik demi kesehatan keluarga dan individu (WHO, 2001).

Rumah adalah tempat hunian atau berlindung dari pengaruh keadaan alam sekitarnya (hujan dan panas) serta merupakan tempat untuk beristirahat setelah melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah harus dapat mewadahi kegiatan penghuninya dan cukup luas bagi seluruh pemakainya, sehingga kebutuhan ruang dan aktivitas setiap penghuninya dapat berjalan dengan baik. Lingkungan rumah juga sebaiknya terhindar dari faktor- faktor yang dapat merugikan kesehatan (Hindarto, 2007:134).

Rumah bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Rumah dapat dimengerti sebagai tempat perlindungan, untuk menikmati kehidupan, beristirahat dan bersuka ria bersama keluarga. Di dalam rumah penghuni memperoleh kesan pertama dari kehidupannya di dalam dunia ini. Rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya, dan lebih dari itu, rumah harus memberi ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya. (Frick, 2006:1).

Rumah berfungsi sebagai wadah untuk lembaga terkecil masyarakat manusia, yang sekaligus dapat dipandang sebagai tempat tinggal bagi tumbuhnya rasa aman atau terlindung. Rumah juga berfungsi sebagai wadah bagi berlangsungnya segala aktivitas manusia yang bersifat intern dan pribadi. Jadi, rumah tidak semata-mata merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan dan pengaruh fisik belakang melainkan juga merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan pengaruh fisik belaka, melainkan juga merupakan tempat tinggal, tempat beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari (Ridho, 2001:18). Dalam arti umum, rumah adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan, namun tempat tinggal yang khusus bagi hewan biasa disebut sangkar, sarang, atau kandang. Sedangkan dalam arti khusus, rumah mengacu pada konsep-konsep sosial kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti keluarga, tempat bertumbuh, makan, tidur, beraktivitas, dll. (Wikipedia, 2012).

Penelitian ini dilakukan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun 2021. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bentuk usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya sebuah penelitian dilakukan dalam upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan solusi atas masalah yang timbul. Menurut Sugiono (2015:32) masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman tentang data Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2020. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penggunaan metode wawancara bertujuan agar data yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penulis. Penentuan informan juga dilakukan agar data yang diinginkan dapat terpenuhi dengan baik. Informan yang dipilih yaitu Bagian yang mengetahui tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kondisi geografis

Duwet merupakan desa yang terletak di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Desa Duwet memiliki luas ± 723 Ha yang terdiri dari 6 Dusun yakni Dusun Bugur, Dusun Krajan, Dusun Duwet Selatan, Dusun Pathek Timur, Dusun Pathek Barat dan Dusun Paras. Pada tahun 2018, penduduk Desa Duwet tercatat sebanyak 3.165 jiwa yang terdiri dari 973 kepala keluarga. Wilayah desa yang luas serta sumber daya manusia yang cukup banyak, Desa Duwet menyimpan banyak sekali potensi desa apabila dapat terus digali dan dikelola dengan baik secara Administrasi Desa Duwet terletak sekitar 8 Km dari ibu kota Kecamatan Panarukan, kurang lebih 7 Km dari Kabupaten Situbondo, dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga diantaranya di sebelah timur berbatasan dengan Desa Olean. Disebelah Selatan berbatasan dengan Desa Alasmalang dan Desa Peleyan sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Selat Madura.

2) Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2020 dilaksanakan oleh aktor-aktor sebagai berikut; Unsur Deputy Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat Tugas dan bertanggungjawab merumuskan, mengkoordinasikan, mensosialisasikan, menetapkan lokasi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan BSPS. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang menangani pemberdayaan perumahan swadaya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tenaga pendamping masyarakat (TPM), Unsur Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hingga Kepala Desa/Lurah.

3) Kelompok Penerima Bantuan (KPB)

KPB beranggotakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan jumlah paling rendah 5 orang dan paling tinggi 11 orang. KPB ditetapkan oleh masing-masing penerima bantuan dibantu pendamping desa. KPB melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Membuat gambaran kerja (GK) dan rencana penggunaan dana (RPD) yang difasilitasi oleh PPK;
- b) Merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2 (daftar rencana pembelian bahan bangunan);
- c) Membeli bahan bangunan dan menunjuk tempat pembeliannya sesuai dengan rencana pembelian bahan bangunan;
- d) Membangun rumah yang mendapat BSPS sesuai dengan GK dan RPD sesuai waktu yang ditetapkan;
- e) Menggerakkan swadaya penerima bantuan berupa dana dan/ atau barang untuk menambah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

4) Persyaratan program bsps

Beberapa persyaratan bantuan menurut Peraturan Menteri Perumahan No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yakni:

A. Kriteria Penerima Bantuan

1. Warga negara Indonesia
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;
3. Sudah berkeluarga;
4. Memiliki atau menguasai tanah;
5. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
6. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial;
7. Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
 - a. memiliki tabungan bahan bangunan;
 - b. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan;
 - c. memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
 - d. memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
 - e. bersungguh-sungguh mengikuti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); dan
 - f. dapat bekerja secara kelompok.

B. Kriteria Objek Bantuan yaitu:

1. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di atas tanah;
2. Dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya
3. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
4. Tidak dalam status sengketa, dan
5. Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang
6. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m² (empat puluh lima meter persegi);
7. Terkena kegiatan konsolidasi tanah atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, dan/atau
8. Terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/atau kebakaran.

C. Indikator Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah:

- a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV;
- b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV;
- c. tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
- d. bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh;rusak; berat; dan/ atau rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m² (sembilan meter persegi).

PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman tentang data Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2020. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penggunaan metode wawancara bertujuan agar data yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penulis. Penentuan informan juga dilakukan agar data yang diinginkan dapat terpenuhi dengan baik. Informan yang dipilih yaitu Bagian yang mengetahui tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Sebelum dilakukan penelitian, penulis melakukan uji materi terlebih dahulu pada beberapa literatur. Kemudian membuat beberapa daftar pertanyaan pada beberapa narasumber. Selanjutnya melakukan wawancara pada narasumber yang sudah ditetapkan. Hasil wawancara kemudian dilaporkan dalam bentuk ringkasan singkat dari beberapa informan tersebut.

1) Tepat Kebijakan

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Bantuan yang diberikan berupa kegiatan memperbaiki komponen rumah atau memperluas rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak huni.

Kebijakan penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah didiskusikan sebelumnya oleh para pemangku kebijakan. Bapak Achmad Zulkifli di Kantor DPKP mengenai Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, beliau mengatakan:

“Ia semua pengusulan calon BSPS dilakukan dengan musyawarah desa karena desa masih memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan masyarakat agar mereka memahami bagaimana program BSPS tersebut dilaksanakan”

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Sonya Agung Gatra Suciption di Kantor DPKP mengenai Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, beliau mengatakan:

“Memang dari awal program ini dilakukan musyawarah desa, karena musyawarah sangat penting agar semua kegiatan berjalan dengan lancar dan yang lebih mengetahui kondisi masyarakatnya yaitu Kepala Desa beserta Perangkat Desa”

Bapak Deni Sugistiawandi juga menjelaskan mengenai Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, beliau mengatakan:

“kalau untuk usulan biasanya memang koordinasinya dengan pihak desa jadi yang mengajukan nama-namanya biasanya dari desa nanti baru kita servikasi”

2) Tepat Target

Berdasarkan penelusuran dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa program BSPS telah dilakukan sejak tahun 2018. Selama periode tersebut program BSPS telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksana dan penerima program tersebut juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagaimana penjelasan Bapak Achmad Zulkifli mengenai Target Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, beliau mengatakan:

“Tidak, Program BSPS ini sudah hampir 3 tahun dilaksanakan mulai tahun 2018 sampai sekarang dan tidak meneruskan Program lain misalnya dalam Program RTLH, Program RLTH itu memfokuskan kepada masyarakat miskin dan benar-benar sepenuhnya dibantu oleh pemerintah sedangkan Program BSPS ini memfokuskan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan hanya memancing masyarakat untuk memperbaiki rumah mereka”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kualitatif dengan metodewawancara, implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari segi kebijakan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) perangkat desa memberikan usulan kepada pemerintah siapa saja yang layak untuk mendapatkan bantuan BSPS tersebut, setelah itu pemerintah menyetujui apa yang di usulkan oleh perangkat desa.
2. Dari segi pelaksana, dari Pendamping hingga Koordinator sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga program BSPS ini berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Dari segi target, dalam hal ini pencapaian target sudah sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal mereka, dari rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni sehingga masyarakat dapat tinggal dengan nyaman dan tentram tanpa ada gangguan misalnya seperti hujan.
4. Dari segi lingkungan, dalam lingkungan harus menciptakan suasana yang rukun dan damai agar tercipta lingkungan yang bersosialisasi tinggi dan tidak lagi ada kecanggungan antara suatu organisasi dengan masyarakat.
5. Dari segi proses, masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dapat merasakan hasil dari adanya program ini serta pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 2005:65). Konsep Implementasi
- Emil Salim dalam Supriatna (2013:82) “mengemukakan karakteristik penduduk miskin”
- Gaventa dan V alderma (dalam Siti Irene Astuti D, 2009:34-35) “ mengemukakan arti partisipasi masyarakat”
- Hartomo dan Aziz (dalam Dadan Hudyana, 2009:28-29) “faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan”
- [Http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle /123456789/18825/BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18825/BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y)
- [Http://repository.uin-suska.ac.id/12258/7/7.%20BAB%20II_2018201ADN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/12258/7/7.%20BAB%20II_2018201ADN.pdf)
- <https://beritamanado.com/ternyata-bsps-adalah-program-kementerian-pupr-bukan-bantuan-pribadi/>
- Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Menurut Moleong (2008:93) “dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus”.
- Menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2013:219) “menjelaskan bahwa pada pemilihan informan memiliki kriteria- kriteria tertentu”.
- Miles, Huberman dan Saldana, (2014:14) Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. Nugroho, dkk 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho (2014:686) “mengungkapkan ada lima tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan”
- Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Surmayadi (2005:79) “mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi